

RUANG MARITIM DI SISI BARAT PULAU SUMATERA YANG DIABAIKAN, SEBUAH TINJAUAN HISTORIOGRAFIS

Bambang Purwanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Most history writing involves and actualizes different perspectives and approaches. As a historiography, the past is usually constructed with value judgment from which historian creates the narrative of history. This article deals with the way how Indonesian historiography excludes systematically the maritime world of western coast of Sumatra and the adjacent islands. The grand narrative of Indonesian history stays in the land of Sumatra and hardly goes to the water world of the surrounding islands. The applied approach is inspired partly by the exclusion and inclusion nature of historiography developed by those who comprehensively critical to the national historical canon, of which maritime world of the western coast of Sumatra and the adjacent islands together people live there is assumed historically not important in representing modern, civilized, and globalized Indonesia. The source material uses consists chiefly of secondary sources. The aim here is not to open debate over what is the reality of the maritime world of western coast of Sumatra and the adjacent islands, but to argue about marginalization and exclusion of the area, and to explain why Indonesian national narrative neglecting it.

Keywords: Western coast of Sumatra, maritime world, adjacent islands, exclusion, marginalization, historiography

:

ABSTRAK

Sebagian besar penulisan sejarah melibatkan dan menghadirkan berbagai cara pandang dan pendekatan. Sebagai historiografi, masa lalu biasanya dikonstruksi berdasarkan nilai tertentu yang digunakan oleh sejarawan untuk membangun narasi sejarah. Tulisan ini membahas tentang bagaimana historiografi Indonesia mengeksklusi secara sistematis dunia maritim pantai barat Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya. Narasi besar sejarah Indonesia berada di daratan Sumatera, dan hampir-hampir tidak menyentuh dunia air dan pulau-pulau di sekitarnya. Dasar berpikir yang diterapkan terinspirasi sebagian oleh prinsip-prinsip eksklusif dan inklusif secara historiografis yang dikembangkan oleh mereka yang kritis terhadap kanon sejarah nasional, dimana dunia maritim pantai barat Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya termasuk masyarakat yang ada di dalamnya diasumsikan secara historis tidak penting untuk mewakili Indonesia yang modern, beradab, dan global. Tulisan ini terutama menggunakan sumber-sumber sekunder. Tujuan tulisan ini bukan untuk membuka perdebatan mengenai apa kenyataan yang terjadi di dunia maritim pantai barat Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya, namun untuk menyatakan adanya marginalisasi dan eksklusi atas daerah tersebut beserta masyarakatnya, serta untuk menjelaskan mengapa narasi nasional sejarah Indonesia mengkerdikan dan mengabaikannya.

Kata kunci: Pantai barat Sumatera, pulau-pulau di sekitarnya, dunia maritim, eksklusi, marginalisasi, historiografi

PENDAHULUAN

Ketika bencana alam besar secara berturut-turut melanda wilayah laut dan darat yang berada di sisi barat Pulau Sumatera sejak awal abad ke-21, sebuah kosa kata baru disumbangkan oleh kearifan lokal yang telah beratus tahun hidup pada masyarakat Pulau Semeulue ke dalam narasi berbahasa di Indonesia. Kata “*smong*” yang merujuk pada “ombak besar sekali” yang menyusul gempa sebagaimana terdapat dalam lagu yang biasa didengarkan oleh masyarakat Semeulue di Aceh ini, hadir sebagai warisan budaya alternatif untuk menggantikan kata *tsunami* yang berasal dari Jepang, yang selama ini umum digunakan untuk mengatakan fenomena alam yang sama. Ironisnya penggunaan kata *smong* itu ternyata sampai saat ini kurang mendapat dukungan di dalam negeri, baik di ranah publik maupun resmi, termasuk nama museum di Banda Aceh yang didirikan untuk memperingati peristiwa gempa dan *smong* tahun 2004. Koran dan majalah terkemuka baik di tingkat lokal maupun nasional di Indonesia yang diharapkan dapat mempromosikan kosa kata tempatan, sampai saat ini ternyata juga masih tetap menggunakan kata *tsunami*, termasuk makna sampingannya seperti *tsunami* informasi (*Kompas*, 3 November 2016; *tempo.co*, 18 November 2016; *Pikiran Rakyat*, 24 April 2017)

Keberadaan gempa besar dan *smong* yang meluluhlantakkan sisi barat Pulau Sumatera dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya pada awal abad ke-21 itu, sudah seharusnya mampu membangun perhatian banyak pihak terhadap wilayah ini, tidak terkecuali para sejarawan. Oleh karena itu ada harapan besar bahwa kenyataan itu juga akan dapat dibaca dalam buku “babon-standar” baru sejarah Indonesia, ketika buku *Indonesia Dalam Arus Sejarah* (IDAS) diterbitkan pada 2012 (*Tempo*, 26 Desember 2012). Harapan akan adanya kesadaran di kalangan sejarawan Indonesia tentang arti penting wilayah ini dalam sejarah Indonesia tentu saja tidak berlebihan. Mengingat karya intelektual yang sangat penting dalam

perkembangan historiografi Indonesia mutakhir itu, dikerjakan di tengah-tengah keprihatinan bencana secara nasional, sementara masyarakat yang hidup di wilayah laut dan darat sisi barat Pulau Sumatera itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa alam itu.

Setelah menelusuri halaman demi halaman seluruh isi jilid 9 yang merupakan faktaneka dan indeks, tidak ditemukan kata gempa yang dapat dijadikan salah satu kata kunci untuk mencari informasi tentang peristiwa alam yang terjadi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di pantai barat Sumatera dan ruang laut yang ada di sekitarnya itu. Sementara itu kata *tsunami* yang umum digunakan untuk menyebut gelombang raksasa itu hanya merujuk pada Museum Tsunami Aceh, yang merupakan bagian dari informasi tentang nama-nama museum di Indonesia, bukan diskrpsi peristiwa sejarah. Penelusuran lebih lanjut menemukan kata kunci “Barus” pada buku jilid II, III, dan IV, yang mengidentifikasi adanya diskrpsi peristiwa tentang wilayah pantai barat Sumatera di dalam buku itu (Abdullah & Lopian [ed.], IX, 2012). Namun nama “Singkil” yang sudah lama digunakan untuk mengacu pada tempat dan tokoh penting dalam perkembangan Islam di wilayah ini tidak ditemukan. Nama “Sibolga”, “Tiku”, “Natal” atau pun “Pariaman” yang mengacu pada beberapa tempat penting dalam sejarah wilayah di pantai barat ini, juga tidak tercantum sebagai kata kunci. Sementara itu di dalam indeks ditemukan kata-kata kunci lain yang berkaitan dengan Bengkulu, Aceh, dan Padang, tiga wilayah atau kota penting di pantai barat Sumatera itu (Abdullah & Lopian [ed.], IX 2012). Bahkan di dalam jilid IV yang berjudul “kolonisasi dan perlawanan”, terdapat sebuah bab khusus tentang “persaingan di pantai barat Sumatera”, selain beberapa bab lain yang membahas peristiwa-peristiwa yang dapat diidentifikasi terjadi di wilayah ini, dari ujung utara di Aceh sampai ujung selatan di Bengkulu dan Lampung (Abdullah & Lopian [ed.], IV, 2012).

Tentu saja harus disadari, sebuah kesimpulan yang pasti tentang uraian historiografis wilayah darat dan laut di pesisir barat Sumatera dari buku itu tidak dapat dibuat hanya dengan melihat faktaneka dan indeks. Pada dasarnya seluruh isi delapan jilid yang lain harus dibaca secara menyeluruh, agar didapat gambaran yang utuh tentang persoalan ini. Sebagai contoh, sebagai salah satu wilayah yang menjadi tujuan para misionaris Kristen Katholik dan *zending* Kristen Protestan, bagian yang membahas tentang perkembangan Kristiani di Indonesia seharusnya juga menempatkan wilayah ini sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Adanya keharusan sebagai prasyarat untuk membaca keseluruhan buku itu sebelum membuat kesimpulan, juga berhubungan dengan berbagai kendala teknis yang dapat saja terjadi dalam setiap penyusunan faktaneka dan indeks. Banyak kata kunci tidak tercantum dalam sebuah penerbitan lebih disebabkan oleh berbagai persoalan teknis dalam proses penyusunan dan penerbitan, daripada ketiadaan pembahasan tentang aspek tertentu dalam sebuah buku.

Terlepas dari persoalan di atas, ada satu hal yang pasti. Indeks dan faktaneka dalam buku yang diharapkan dapat melengkapi atau bahkan mengganti kedudukan buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) itu, hanya mencantumkan kata kunci “suku Mentawai” untuk mengidentifikasi keberadaan pulau-pulau dan kepulauan beserta masyarakatnya yang ada di sisi barat ruang laut Pulau Sumatera dalam sejarah Indonesia. Pulau Enggano, Nias, dan Simeulue menyebut tiga pulau dari banyak pulau penting di wilayah ini, bersama Siberut, Pagai dan pulau-pulau lain di Kepulauan Mentawai, tidak ditemukan dalam indeks. Padahal di dalam beberapa pembahasan dalam jilid-jilid terpisah, ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan pulau dan kepulauan tersebut, terutama yang berkaitan dengan Nias.

Sementara itu ketika perbincangan tentang pantai barat Sumatera keluar dari konteks buku IDAS dan SNI, buku karya Gusti Asnan yang membahas dengan san-

gat menarik dan memberi sumbangan penting bagi kajian sejarah tentang “dunia maritim pantai barat Sumatera”, ternyata merupakan karya yang difokuskan pada ruang darat dari sisi barat Pulau Sumatera. Dalam bagian yang membahas tentang “orang-orang pantai barat Sumatera” yang merupakan salah satu wujud dari sejarah hubungan antardaerah yang terjadi di ruang geografis ini sebagai contoh, isi buku dipenuhi dengan pembahasan tentang orang Minangkabau dan Batak sebagai masyarakat maritim pantai barat Sumatera. Walaupun kajian itu juga mencakup kelompok masyarakat lain termasuk orang Mentawai dan Nias yang berasal dari ruang laut di sisi barat Sumatera itu, keberadaan mereka dalam pembahasan itu lebih dikarenakan keberadaannya di ruang darat pantai barat Pulau Sumatera, bukan Mentawai dan Nias sebagai bagian dari dunia maritim. Peta pantai barat bagian selatan pulau Sumatera yang terdapat dalam buku itu bahkan mengisyaratkan bahwa, dunia maritim pantai barat hanya ruang daratnya saja, dan seakan-akan benar-benar terpisah dari ruang lautnya (Asnan, 2007). Padahal jika merujuk pada tulisan Tsuyoshi Kato dan Mestika Zed, para pedagang Minangkabau secara terus menerus telah lama melakukan hubungan ekonomis dengan masyarakat di pulau-pulau di lepas pantai Sumatera itu, baik sebagai konsumen maupun produsen (Kato, 1986; Zed, 2017). Catatan lain juga menyebutkan bahwa, keberadaan rantai kapal dari masa kolonial pada setiap rumah adat milik para penguasa di Nias selatan merupakan salah satu bukti keikutsertaan Nias dalam hubungan antardaerah dalam ruang maritim sisi barat Pulau Sumatera sejak beberapa abad lalu (Feldman, 1984; Schroder, 1917).

Pengabaian dan posisi marginal ruang laut dari sisi barat Pulau Sumatera itu juga dapat dilihat lebih jauh dalam daftar nama wilayah administratif dan kawasan geografis utama di Sumatera sampai pertengahan tahun 1960-an. Pada salah satu tulisan yang membahas tentang ruang geografis dan administratif Sumatera

Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, empat provinsi yang didalamnya terdapat pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera itu pada masa itu, keberadaan pulau-pulau itu hanya diwakili oleh Nias sebagai bagian dari Tapanuli, yang disebutkan berpenduduk 314.829 orang pada tahun 1961 menurut Biro Pusat Statistik. Sibolga disebutkan sebagai satu-satunya pelabuhan utama dan kotapraja di pantai barat Tapanuli. Sementara itu keberadaan Gunungsitoli di Pulau Nias digambarkan hanya sebagai wilayah pendukung dalam kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Cara pandang sama yang mengkerdikan itu juga dapat dilihat pada diskripsi tentang kegiatan kegerejaan di wilayah ini, yang dianggap berada dibawah bayang-bayang pusat penyebaran agama Kristiani di daratan, terutama Tarutung, Balige, dan Sidikalang yang semuanya terletak di daratan Sumatera (Whittington, 1967). Padahal menurut catatan Controleur W.A. Ginsel pada 1937, sebuah gerakan sejenis reformasi kegerajaan *Fangefa Sebuah* berlangsung dengan pesat di ruang laut Nias sejak akhir abad ke-19, dan mencapai puncaknya pada beberapa dekade awal abad ke-20 melalui gerakan *Fa'awosa* (Ginsel, 2003). Ketiadaan ruang laut dalam narasi besar sejarah wilayah itu seakan-akan mengulang laporan lebih dari setengah abad sebelumnya tentang negara-negara tua dan wilayah-wilayah penting di Sumatera, yang miskin dengan diskripsi tentang dunia maritim yang berada di sisi barat Sumatera (Kehding, 1886; Schlegel, 1901a; Schlegel, 1901b; Schlegel, 1901c).

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini membahas tentang kedudukan pulau-pulau dan masyarakat yang hidup di wilayah ini dalam konteks historiografi Indonesiasentris. Jika kolonialsentris diasumsikan cenderung menafikan hak sejarah dari masyarakat yang ada di pulau-pulau itu, atau mengkategorikan mereka sebagai bagian dari sebuah ketidakberadaan masyarakat bumiputera yang terjajah, dalam hal apakah dan sejauhmanakah historiografi Indonesiasentris yang sering diposisikan sebagai antitesis dari koloni-

alsentris itu berpengaruh terhadap eksistensi kesejarahan ruang geografis dan masyarakat yang hidup di sebagian pulau-pulau terluar Indonesia itu? Apakah dalam konteks Indonesia yang telah berstatus sebagai sebuah negara merdeka, masyarakat di pulau-pulau itu memiliki hak atas sejarah? Atau apakah status kesejarahan mereka tetap bertahan dalam dunia sebelum sejarah, yang berkonotasi liar dan tidak beradab?

Tulisan ini didasarkan pada sumber-sumber skunder yang telah tersedia, baik berupa kajian khusus tentang pantai barat termasuk wilayah laut Sumatera, maupun data tentang wilayah pantai barat Sumatera sebagai bagian dari kajian sejarah Indonesia secara umum dan Sumatera secara khusus. Data-data itu kemudian ditempatkan dalam satu kerangka dasar berpikir bahwa hubungan antardaerah di pantai barat Sumatera dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya ditandai oleh pengabaian terhadap kenyataan yang ada pada ruang geografis kelompok yang terakhir. Penjelasan itu didasarkan pada prinsip inklusi dan eksklusi yang sering menyertai sebuah konstruksi historis sebagai perwujudan dari politik sejarah secara konseptual yang dipengaruhi oleh wacana besar yang berlaku, sehingga selalu terbentuk garis pemisah yang tegas antara apa dan siapa yang masuk dan keluar dari suatu kenyataan sejarah pada sebuah wilayah sebagai sebuah naratif besar. (Foucault, 2006; Peters & Besley, 2014; Polonen, 2005; Coutin, 2000; Haynes, 1998; Baudrillard, 1983).

Berdasarkan kerangka berpikir itu, historiografi Indonesia selama ini diasumsikan menempatkan ruang laut di pantai barat Pulau Sumatra beserta masyarakatnya sebagai sesuatu yang tidak memenuhi standar untuk menjadi kelompok yang memiliki hak atas sejarah karena “kerendahan” dan “kekalahan” multidimensi.

Pengabaian dan pengerdilan yang dibentuk oleh garis pemisah yang tegas itu diasumsikan tidak hanya dilakukan oleh para aktor politik yang biasanya dipenuhi oleh kepentingan sesaat, melainkan juga

oleh para akademisi karena ketidakjelasan disiplin ilmu dan kerancuan filosofis serta metodologi yang mendasarinya dalam menghadirkan, menjelaskan, dan memahami kenyataan sejarah. Ketika modernitas beserta unsur-unsur yang menyertainya sebagai pewaris dari proses sejarah kolonialisme menjadi kata kunci dan konsep utama dalam konstruksi sejarah Indonesia yang merdeka, maka tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi bagi mereka yang sudah diposisikan berada di luar dari kemodern tentang batas-batas hak-hak mereka untuk diakui sebagai bagian dari sejarah Indonesia (Purwanto, 2006).

Berdasarkan persepektif ini, Indonesia yang diasumsikan modern dan beradab sebagai sebuah warisan kolonial itu, pada prinsipnya hanya mengandung masa lalu yang dapat dikategorikan sebagai representasi dari unsur-unsur modern dan beradab. Atau dengan kata lain, sejarah seakan-akan hanya menjadi hak mereka yang modern dan beradab (Purwanto, 2006). Adanya ketergantungan para sejarawan terhadap sumber-sumber tertulis dan resmi diperkirakan sebagai salah satu sebab dari keengganan para sejarawan untuk menghadirkan ruang maritim masyarakat di sisi barat Sumatera ke dalam naratif besar sejarah Indonesia. Padahal seperti telah dilakukan oleh James Dananjaya dalam tulisannya tentang *Ono Niha* di *Tano Niha*, keberadaan sumber-sumber lisan seperti prosa naratif berupa nyanyian, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penulisan sejarah wilayah ini (Danandjaja, 1975; Danandjaja, 1969-1971). Penggunaan sumber-sumber ini secara kritis, paling tidak dapat membedakan kredibilitas logika historis antara legenda dengan mitos yang hidup di dalam masyarakat Nias. Ketika digunakan dalam sebuah konstruksi historis, ketepatan logika mitos menurut Danandjaja masih perlu dipertanyakan dibandingkan dengan legenda (Danandjaja, 1975).

SISI BARAT SUMATERA DAN LAUTNYA YANG DIABAIKAN

Tiupan angin kencang yang diikuti dengan alunan gelombang besar yang merupakan bagian dari kenyataan sehari-hari alam Samudera Hindia, seakan-akan menjadi salah satu alasan pembenar untuk menyatakan bahwa wilayah pantai barat Pulau Sumatera, termasuk gugusan pulau yang ada di dalamnya, bukan tempat yang ideal bagi berlangsungnya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Berbagai kesulitan yang harus dihadapi ketika orang ingin mencapai wilayah ini, sering dijadikan dasar berpikir untuk menyatakan bahwa wilayah ini bukan tempat yang perlu didatangi dan dikembangkan sebagai salah satu pusat dalam aktivitas manusia. Cerita tentang angka kematian orang Eropa yang tinggi dan berbagai kesulitan dan musibah yang dihadapi oleh keluarga Thomas Stamford Raffles ketika mereka tinggal di Bengkulu, semakin memperkuat citra keganasan daerah pantai barat ini, sehingga peran kesejarahannya seakan-akan dapat diabaikan begitu saja.

Kebesaran kekuasaan Kedatuan Sriwijaya paling tidak sejak abad ke-7 dan disusul oleh Kemaharajaan Melayu-Jambi sebelum Adityawarman hadir sebagai simbol penting sebuah kekuasaan di Sumatera Barat pada pertengahan abad ke-14 (Wolters, 1967), berakibat pada adanya kecenderungan untuk selalu menempatkan wilayah pantai timur lebih penting sebagai pusat dari berbagai aktivitas politik, ekonomi, dan kebudayaan dibandingkan dengan wilayah pantai barat dalam historiografi yang ada selama ini. Sementara itu keredupan Kedatuan Sriwijaya dan Kemaharajaan Melayu-Jambi (Wolters, 1970), juga tidak begitu saja memberi ruang pada kenyataan sejarah yang terjadi di pantai barat dalam historiografi, walaupun beberapa bukti sejarah menunjukkan terbentuknya pusat-pusat ekonomi dan politik baru baik di ruang laut maupun ruang darat sisi barat Pulau Sumatera itu, khususnya Barus. Keberadaan legenda Malin Kundang di alam pesisir Minangkabau yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya setelah menjadi saudagar kaya dan

memiliki banyak kapal dagang, dibiarkan hanya sekedar sebagai tradisi lisan dengan muatan moral tanpa diperhatikan konteks historisitasnya. Padahal tanpa harus tergantung pada teori dan konsep yang canggih sekalipun, *kaba* Malin Kundang di Pesisir Selatan itu merepresentasi adanya keramaian di dunia maritim sisi barat Pulau Sumatera di beberapa abad yang lalu.

Keberadaan Kesultanan Samudera-Pasai sejak abad ke-13 disusul oleh Aceh dan Kesultanan Melayu-Riau, yang secara geografis berada di atau lebih dekat dengan wilayah pantai timur, seakan-akan terus menutup eksistensi kesejarahan yang ada di pantai barat. Aliansi antara Pasai dan Malaka yang pada waktu itu dipimpin oleh Parameswara yang telah memeluk agama Islam, berakibat pada semakin ramainya hubungan perdagangan antara Pasai dan Malaka, yang merupakan dua bandar dagang utama di Selat Malaka pada abad ke-15 (Zuhdi [ed.], 1993; Alfian, 2005). Periode ini sampai batas tertentu dapat dikatakan sebagai periode penting dari terbentuknya aliansi Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaya, yang mencapai puncaknya setelah berkembangnya kekuasaan Melayu-Riau pada masa berikutnya. Sementara itu perkembangan pesat Kesultanan Aceh sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-17, seakan-akan memutus peran utama pantai barat dalam sejarah yang telah dibangun Barus jauh sebelumnya (Guillot (ed), 2002; Drakkard, 2003; Guillot *et al*, 2008). Di dalam konteks hubungan antardaerah, narasi besar historiografi Indonesia selama ini hanya difokuskan pada keperkasaan Kesultanan Aceh atas entitas lain di pantai barat Sumatera sepanjang abad ke-17. Salah satu akibatnya, secara historiografis terjadi peminggiran fakta sejarah dari terbentuknya identitas hibrid *melayu-pasisir* di seputar Barus, kenyataan sosio-kultural yang terbentuk dari interaksi berbagai unsur di ruang laut dan darat dalam dunia kosmopolis pantai barat, dimana Minangkabau hadir sebagai unsur dominan yang berbagi dengan Batak dan Aceh (Kathirithamby-Wells, 1969;

Tanjung, 2016). Oleh karena itu masyarakat dan budaya *pasisir* sebagai sebuah keunikan yang hidup dalam sejarah pantai barat Sumatera, tidak pernah hadir dalam narasi besar sejarah Indonesia.

Eksklusi historiografis atas wilayah pantai barat ini semakin diperkuat seiring dengan menguatnya kekuasaan kolonial Belanda. Citra yang berhasil dibangun atas Deli dan wilayah sekitarnya di Sumatera Timur yang diposisikan lebih penting dibandingkan Padang dalam konteks sejarah kolonial Belanda sejak akhir abad ke-19, juga hanya memberi sedikit ruang pada kenyataan sejarah di pantai barat dalam tulisan sejarah. Sementara itu memori kolektif yang menghubungkan eksistensi kolonial dalam sejarah Indonesia dengan Belanda, menafikan kenyataan sejarah di pantai barat sehubungan dengan eksistensi Inggris yang cukup lama di wilayah ini. Padahal ketika kongsi dagang Belanda dan kemudian pemerintah Hindia Belanda lebih banyak berinteraksi dengan kekuasaan dan masyarakat di pantai timur, pengaruh Inggris di pantai barat begitu terasa sejak abad ke-17 sampai dengan beberapa dekade awal abad ke-19 (Harfield, 2000). Namun dalam kenyataan historiografi Indonesia, keberadaan Inggris sebagai kekuasaan politik dan ekonomi asing dominan yang berbagi dalam kurun waktu yang bersamaan dengan VOC dan kemudian Hindia Belanda di Bengkulu sebagai salah satu wilayah di pantai barat Sumatera sampai dua dekade pertama abad ke-19, juga tidak pernah menjadi narasi nasional. Walaupun Inggris berada di Bengkulu kurang lebih 150 tahun sejak mereka membangun pos dagang yang pertama pada tahun 1684 setelah kalah bersaing dengan Belanda di Banten dua tahun sebelumnya sampai dengan ditandatanganinya Traktat London 1824, keberadaan Inggris di salah satu wilayah di pantai barat Sumatera tidak pernah dianggap penting dalam historiografi Indonesia.

Kerancuan berpikir secara historiografis di atas berakibat pada narasi besar sejarah Indonesia yang hanya mengenal Belanda sebagai penguasa Barat tunggal

yang membentuk kekuasaan kolonial, dan meminggirkan kenyataan sejarah Inggris di ruang dan waktu yang sama dalam konteks sejarah Indonesia pada masa kolonial, kecuali keberadaan Inggris pada masa transisi di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Begitu juga dengan narasi sejarah Indonesia dari abad ke-17 sampai awal abad ke-19 selama ini yang hanya berputar di sekitar ruang sejarah Belanda, padahal pada kenyataannya Inggris memainkan peran yang sejajar dan setara dengan Belanda di Kepulauan Indonesia pada periode yang sama. Bahkan sampai batas tertentu Portugis juga merupakan kekuatan Barat yang tetap penting pada masa itu (Pradjoko, 2006). Salah satu akibatnya, kenyataan sejarah berupa siasat sosio-kultural yang dilakukan para perempuan Bengkulu yang melawan secara cerdas dan lembut terhadap sistem penanaman wajib yang diberlakukan oleh sebuah kekuasaan Barat, dan keikutsertaan perempuan dalam aktivitas perdagangan antar wilayah dalam sejarah Indonesia (Andaya, 1995), tidak pernah menjadi bagian dari memori sosial bangsa Indonesia. Di wilayah yang lain, hal serupa juga dapat dilihat pada ketidakpedulian terhadap konteks historis Portugis di Timor Leste dan keberadaan Oekusi di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia dalam historiografi Indonesia.

Padahal dalam kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian sejarah sejak dulu sampai dengan yang mutakhir menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat menarik dan penting bagi sejarah Indonesia telah terjadi di ruang laut dan darat sepanjang pantai barat Sumatera ini, paling tidak sejak abad ke-13 (Harfield, 2000; Kathirithamby-Wells, 1977; Bastin, 1965). Seiring dengan terbentuknya kekuasaan politik Islam di wilayah ini, pada saat yang sama ditemukan bukti-bukti tentang keberadaan pusat-pusat produksi dan perdagangan hasil hutan di sepanjang pantai barat itu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jejaring perdagangan regional yang berlangsung pada waktu itu. Walaupun sebenarnya beberapa bukti lain menunjukkan bahwa

berbagai jenis komoditi terutama kamper, damar, kemenyan, dan emas yang berasal dari wilayah ini, telah mencapai belahan bumi lain jauh sebelum abad ke-13. Dalam konteks ini, eksistensi Barus merupakan bukti kuat akan kesejarahan wilayah pantai barat ini, yang diperkirakan telah dimulai paling tidak sejak abad ke-6 (Guillot (ed), 2002; Drakkard, 2003; Guillot *et al*, 2008). Sementara itu kehadiran misi Kristiani terutama di ruang laut sisi barat Pulau Sumatera di abad ke-19 memberi warna lain lagi, yang pada saat ini menjadi unsur dominan dalam kehidupan masyarakatnya.

Ironisnya, tradisi historiografi yang disebut Indonesiasentris yang berlaku selama ini memiliki kecenderungan berangkat dari dasar berpikir yang hampir sama dengan kolonialsentris (Belanda) yang digantikannya (Purwanto, 2006). Mengikuti cara berpikir Mohammad Ali, tradisi historiografis itu bukan Indonesiasentris melainkan lebih merupakan perpaduan antara etnosentris dengan antikolonialsentris atau antineerlandosentris (Ali, 2005). Akibatnya, terlalu banyak kenyataan historiografis yang dapat dikategorikan sebagai kelanjutan tradisi etnosentris dan kolonialsentris di dalam tradisi Indonesiasentris yang dipraktikkan selama ini. Ketika historiografi Indonesia yang berorientasi pada ruang darat yang kuat tidak mampu menghadirkan kenyataan kesejarahan ruang darat wilayah pantai barat Sumatera, maka sudah dapat dipastikan bahwa ruang laut pun akan lebih diabaikan atau dikedirikan.

Dalam konteks yang terakhir inilah, pulau-pulau yang ada di ruang laut sisi barat Pulau Sumatera itu dieksklusi secara historiografis dalam sejarah hubungan antardaerah. Padahal menurut berbagai catatan dari abad ke-17, pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera itu telah berhubungan dagang dengan Barus sejak lama. Sementara catatan Inggris pada awal abad ke-19 menyatakan bahwa para elite Nias mendapat keuntungan yang sangat besar dari perdagangan budak pada masa itu, ketika tidak kurang dari 1500 orang budak setiap tahun dikirim ke

berbagai daerah dari pelabuhan di Nias selatan (Feldman, 1984). Fakta-fakta itu seharusnya memberi ruang kepada wilayah laut di barat Sumatera sebagai bagian dari narasi besar sejarah Indonesia, mengingat perdagangan budak merupakan bagian penting dari kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia dan interaksinya dengan berbagai unsur luar.

Mengikuti kerangka berpikir Hildred Geertz, Peter Belwood menyatakan ada tiga kelompok masyarakat yang tinggal di Indonesia. Dua kelompok pertama yang dipengaruhi peradaban India dan Islam digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang lebih superior dibandingkan dengan kelompok kecil ketiga, kelompok “yang mempertahankan budaya tradisional mereka dan terutama tinggal di pedalaman atau di pulau-pulau terpencil” (Belwood, 2000). Kelompok ini disebut sebagai masyarakat yang secara kultural “tetap paling mendekati budaya nenek moyang Austronesia”. Hal itu menunjukkan bahwa klasifikasi yang dibuat oleh Peter Belwood itu menyisakan kesan bahwa, masyarakat yang meneruskan peradaban Austronesia sebagai sesuatu yang inferior. Sebagai pewaris peradaban Austronesia, masyarakat yang mendiami ruang laut sisi barat Pulau Sumatera tentu saja mengalami pengabaian dan pengerdilan ketika historiografi bertumpu pada tradisi cara berpikir di atas.

Pengabaian dan pengerdilan itu selain dapat dijelaskan karena adanya hegemoni tradisi besar India, Islam, dan Barat dalam historiografi Indonesiasentris selama ini yang bertumpu pada determinasi modern dan beradab, hal itu juga dapat dihubungkan dengan masih dominannya peran “orang besar” dalam sejarah. Penduduk pulau-pulau yang digambarkan oleh William Marsden penuh dengan penyakit panu yang hidup di rumah yang kotor (Marsden, 2008), tentu saja tidak akan mendapat tempat dalam sejarah yang ditulis oleh sejarawan Indonesia, yang masih terjebak pada pola berpikir yang sama dengan tradisi kolonialsentris yang ingin digantikan. Terlepas dari diskripsi komprehensif yang menun-

jukan adanya “dunia modern” di Nias dalam *magnum opus*-nya, seperti juga yang lain, E.E.W. Gs. Schroder menganggap arti sangat penting dari Nias karena posisinya yang tertutup dan ditandai oleh kehidupan masyarakat yang primitif dan arkais (Schroder, 1917).

Sementara itu dalam konteks kekinian, seperti diketahui bersama, pulau-pulau yang ada di ruang laut pesisir barat Sumatera itu sekarang terpisah ke dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan propinsi, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Bahkan jika dilihat baik dari kedekatan geografis dan historis, ada kekacauan logika dalam menentukan batas-batas wilayah administratif itu. Sebagai contoh, Pulau Enggano secara geografis lebih dekat dengan Kabupaten Bengkulu Selatan atau Kabupaten Bengkulu Tengah, namun secara administratif pulau itu merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu menunjukkan telah terjadinya pengerdilan dan pengabaian atas eksistensi pulau itu secara internal, sesuatu yang seiring dengan pola umum perspektif penulisan sejarah di Indonesia selama ini. Narasi besar tentang keterbelakangan itu kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat di pulau-pulau itu mencitrakan diri mereka sendiri sampai saat ini. Di dalam masyarakat Mentawai misalnya, menurut Maskota Delfi ketika dibandingkan dengan kelompok lain orang, mereka menganggap dirinya sendiri “terbelakang”, “kuno”, “primitif”, dan “tertinggal” (Delfi, 2013).

Dua seri buku utama yang dapat disebut sebagai representasi dari penulisan sejarah yang dihasilkan oleh sejarawan Indonesia adalah enam jilid SNI beserta jilid VII yang malu-malu, dan sembilan jilid IDAS. Di dalam dua buku itu, hampir seluruh pembicaraan tentang masyarakat yang ada di Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai berada pada jilid yang sama, yang diberi judul prasejarah. Sementara itu masyarakat di Pulau Enggano dan Pulau Simeulue hampir-hampir tidak punya tempat dalam sejarah Indonesia.

Walaupun masyarakat Simeulue sejak lama telah mampu membangun sebuah sistem pengetahuan yang sebenarnya sangat berguna bagi sistem peringatan dini untuk menghadapi bencana *smong* setelah terjadi gempa besar, masyarakat di Simeulue juga belum mendapat pengakuan sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsanya, sama seperti orang Enggano, Nias, Mentawai, dan masyarakat lain di pulau-pulau lain di sekitarnya.

Baik di dalam SNI maupun IDAS, kenyataan yang berlangsung dalam diri penduduk yang tinggal di Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Kepulauan Mentawai hanya dihadirkan sebagai bagian dari cerita tentang sebuah kebudayaan yang statis dan tertinggal, baik dalam arti arkeologis maupun etnografis. Di dalam buku SNI, keberadaan orang Nias misalnya ditempatkan pada bab yang diberi judul “sisa-sisa kehidupan prasejarah masa kini” (Kartodirdjo, Poesponegoro dan Notosusanto (ed), 1976). Nias hanya hadir dalam pembicaraan tentang semua hal yang terbelakang bersama-sama orang Toraja, Flores, Kubu, Papua, atau Dayak. Ada kesan yang sangat kuat, secara historiografis Nias seakan-akan tidak dapat dibicarakan secara bersama-sama dan setara dengan orang Melayu, Minangkabau, Bugis-Makassar, atau Jawa yang dianggap beradab.

Bahkan dalam salah satu bagian tulisan tentang tradisi megalitik, disebutkan bahwa kehidupan orang Nias sebagai sesuatu “sangat berbahaya” (Kartodirdjo, Poesponegoro, dan Notosusanto [ed.], 1976). Walaupun sulit untuk mendefinisikan secara pasti apa makna dari ungkapan “sangat berbahaya” itu, apakah terancam atau membahayakan orang lain, tetap saja sulit untuk memungkiri bahwa eksistensi masyarakat di pulau-pulau di sisi barat Sumatera itu sebagai sesuatu yang dianggap tidak penting dalam sejarah Indonesia. Tindakan Aceh yang menyerang Nias pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 dalam rangka untuk memonopoli perdagangan budak sebagaimana telah diuraikan panjang lebar oleh Denis Lombard (Feldman, 1984),

cenderung hanya diadopsi sebagai fakta bagi sejarah Aceh, dan tidak ada upaya untuk mengkonversinya juga sebagai sejarah Nias itu sendiri. Akibatnya, masyarakat dan kebudayaan di pulau-pulau terluar itu hanya perlu menjadi objek untuk penelitian para arkeolog dan antropolog, sedangkan sejarawan tidak perlu melakukan kajian di pulau-pulau itu.

Masyarakat seperti di atas selalu diposisikan sebagai masyarakat yang tidak memiliki sejarah atau tidak punya hak atas sejarah, karena mereka tidak lebih dari sekumpulan para pengacau (Scarduelli, 1990). Mengikuti cara berpikir para peneliti yang bertumpu pada tradisi besar orientalistik dari masyarakat Timur yang eksotik yang cenderung menggambarkan masyarakat seperti yang ada di Nias dan kepulauan Mentawai, para ilmuan Indonesia pun cenderung memposisikan masyarakat yang hidup di ruang laut lepas pantai barat Sumatera itu sebagai komunitas yang jauh dari masa sejarah yang diidentikkan dengan ke-modernan dan peradaban. Oleh karena itu usaha Peter Suzuki yang ingin membicarakan Nias dalam konteks “*state formation*” melalui istilah *ori* yang digunakan masyarakat setempat, tidak hanya ditentang dalam ruang diskusi akademik internasional (Suzuki, 1977; Winzeler, 1977; Suzuki, 1978), melainkan juga tidak pernah mencari diskursus dalam perbincangan akademik para sejarawan Indonesia. Jika pun ada sejarah di pulau-pulau itu, maka itu adalah sejarah dari benda-benda atau tradisi yang tersisa, bukan sejarah dari masyarakat yang menghasilkan dan hidup dengan benda-benda dan tradisi itu. Padahal jika dilihat dari perspektif kekinian yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan misalnya, praktik pertanian penduduk di pulau-pulau itu hampir-hampir tidak tergantung pada api dalam proses produksi pertanian mereka, seperti yang dilakukan penduduk di Pulau Siberut. Teknik bercocok tanam seperti ini berujung pada berkurangnya kemungkinan terjadi erosi dalam waktu yang panjang, karena tanah tidak terpapar secara langsung oleh angin, matahari, dan hujan

(Persoon, 2003).

Konstruksi historis yang berpangkal pada cara berpikir yang hampir serupa terulang dalam buku IDAS, walaupun penerbitan buku ini telah berjarak lebih dari 35 tahun setelah penerbitan pertama buku SNI, dan masyarakat di pulau-pulau itu telah mengalami perubahan dalam banyak hal. Di dalam buku ini, keberadaan masyarakat dan kebudayaan di pulau-pulau pesisir barat Sumatera itu tetap digambarkan sebagai bagian dari “tradisi prasejarah masa kini” (Abdullah & Lapian (ed), 2012). Berbekal konsep-konsep baru seperti “perspektif masa lalu, kini dan mendatang”, multikulturalisme, dan kearifan, buku ini nampaknya ingin menghadirkan warna baru dalam memahami kenyataan yang masih tersisa dari kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Akan tetapi dalam konteks historiografis, kesan adanya pengabaian dan pengerdilan atas kenyataan sejarah masyarakat pendukungnya tidak terhindarkan. Sebagai contoh, fakta keberadaan kebijakan khusus yang dilakukan Departemen Sosial yang menjadikan Pulau Engano sebagai pemukiman baru bagi komunitas tuna karya dari Pulau Jawa sejak tahun 1961 (Jaspan, 1964), dipahami sebagai kenyataan dari inferioritas sebuah masyarakat yang tidak perlu mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Padahal kebijakan itu berpengaruh sangat besar tidak hanya secara demografis melainkan juga perubahan sosial-budaya masyarakat lokal, yang berujung pada terancamnya nilai-nilai dan tradisi yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia.

Nias di dalam buku IDAS misalnya, hanya hadir dalam penjelasan historis tentang keberlanjutan tradisi megalitik, yang ditandai dengan penggunaan alat musik dalam berbagai upacara adat dan keberadaan pahatan alat musik di bangunan megalitik. Sesuatu yang juga menjadi pola umum dari cara berpikir para penulis asing yang terpaku pada tradisi besar orientalisme. Ironisnya, tradisi dan bangunan megalitik disebutkan sebagai produk manusia prasejarah bukan manu-

sia yang memiliki sejarah atau berhak atas sejarah. Padahal jika mengikuti jalan pikiran Herry Elmer Barnes, penggunaan terminologi prasejarah tidak lagi akurat dan logis, “kecuali untuk menandakan periode yang samar-samar dan hipotetik dari kehidupan manusia yang paling awal ketika belum ada peninggalan nyata, atau hanya pada sesuatu yang menempatkan sejarah sebatas cabang dari kesusasteraan” (Barnes, 1962).

MENCARI HAK SEJARAH MASYARAKAT DI RUANG LAUT PULAU-PULAU TERLUAR

Ketika buku William Marsden berjudul *History of Sumatra* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1783 dan kemudian edisi ketiga yang sudah dilengkapi diterbitkan pada tahun 1811, deskripsi di dalam buku itu tidak lagi dapat disebut masyarakat yang ada di ruang laut pesisir barat Pulau Sumatera tidak memiliki sejarah atau hidup di dalam prasejarah. Bahkan sebelum itu pada abad ke-9, berita Arab dan Persia telah mencatat tentang kehidupan masyarakat di Pulau Nias (Rappard, 1909). Dalam konteks sejarah ekonomi, Marsden menggambarkan bahwa orang Nias misalnya, pada bagian kedua abad ke-18 telah menanam padi bukan untuk kebutuhan mereka sendiri melainkan untuk diperdagangkan (Marsden, 2008). Berbeda dengan gambaran umum tentang masyarakat prasejarah yang ada selama ini, penduduk Nias selain menanam berbagai jenis umbi-umbian sebagai makanan pokok, Henry Lyman pada dekade ke-4 abad 19 juga melaporkan bahwa penduduk asli Nias terutama yang berada di bagian selatan, juga telah menanam padi untuk diperdagangkan. Selain itu, penduduk Nias juga menjual sarang burung walet kepada pedagang Tionghoa yang datang ke pulau itu, dengan harga \$12 per *pound* (Reid, 1995).

Penduduk Siberut di Kepulauan Mentawai juga sudah sejak lama menghasilkan kulit penyu, ikan, kopra, dan berbagai hasil hutan terutama rotan dan damar untuk ditukarkan kepada para

pedagang yang datang ke pulau itu, yang membawa berbagai peralatan dari besi, garam, kain, tembakau, barang-barang yang terbuat dari gelas (Persoon, 2003). Hal itu semua menunjukkan bahwa perdagangan dan sampai tingkat tertentu juga ekonomi komersial, bahkan uang, bukan merupakan sesuatu yang baru bagi penduduk di pulau-pulau itu. Perkembangan agama Kristiani yang pesat di Nias sejak akhir abad ke-19 sebagai contoh, menunjukkan keberadaan ekonomi uang di dalam masyarakat, yang ditandai dengan kemampuan gereja mengumpulkan uang dari para jemaat. Gerakan pembaruan Fa'awosa misalnya, menarik pajak gereja 25 sampai dengan 50 sen per orang setiap tahun dari para jemaatnya yang merupakan penduduk lokal pada awal 1930-an. Sementara itu *Rijnische Zending* mewajibkan setiap jemaat membayar 0,50 sen sampai dengan 2,5 gulden setahun. Pada waktu itu, sumbangan baik wajib maupun sukarela dalam bentuk uang juga sudah berlaku untuk sakramen perkawinan, pembaptisan, dan kegiatan lainnya (Ginsel, 2003:32-37)

Penduduk Nias pada dasarnya telah lama terhubung dengan jejaring perdagangan yang tidak hanya melibatkan Barus yang ada di seberang timur, melainkan juga dengan Madras dan Surat yang jauh di utara untuk mendapatkan berbagai perhiasan, benda-benda logam, dan tekstil. Selain memanfaatkan berbagai umbi-umbian dan sagu sebagai bahan makanan pokok, orang Nias juga memperdagangkannya bersama-sama berbagai jenis kacang-kacangan dan ternak, khususnya ayam ke Barus (Marsden, 2008). Pada tahun 1913, tidak kurang dari 2500 ton beras didatangkan dari Penang, Singapura, dan Padang (Schroder, 1917). Di samping itu, di dalam edisi buku William Marsden yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat sebuah foto yang menunjukkan bahwa rotan merupakan komoditas penting yang masih dihasilkan penduduk Pulau Enggano pada 1915. Bahkan menurut informasi lebih lanjut yang terdapat pada foto itu disebutkan, bahwa produksi dan perdagangan

rotan di Enggano sudah dilakukan oleh VOC sejak abad ke-17 (Marsden, 2008), walaupun keterangan ini tentu saja perlu dikaji lebih jauh kebenarannya. Sementara itu di Kepulauan Nako-Nako yang dihuni oleh orang Maros atau Maruwi, Marsden juga menyatakan bahwa masyarakat setempat telah menghasilkan minyak (kelapa?) untuk dijual ke Padang (Marsden, 2008). Oleh karena itu tidak mengherankan jika Stoompaketaart Maatschappij telah menghubungkan Gunung Sitoli dengan Padang dan Sibolga secara rutin sejak 1868, dan kemudian dari Hinako di sisi barat sejak 1907 (Schroder, 1917).

Hal yang terakhir ini dapat dibandingkan dengan pengalaman Muhammad Saleh, seorang pedagang dari Pariaman yang telah melakukan berbagai aktivitas ekonomi di sepanjang pantai barat Sumatera sejak abad ke-19. Berdasarkan tulisan Tsuyoshi Kato dan Mestika Zed yang mendasarkan penelitian mereka atas buku kenang-kenangan yang ditulis Muhammad Saleh pada tahun 1914, diketahui bahwa orang Nias sudah merupakan para pembuat garam dan minyak kelapa yang handal dan terkenal di sepanjang pantai barat Sumatera. Bersamaan dengan pengusaha lain yang sebelumnya menjadi pesaingnya, Muhammad Saleh yang dibantu oleh orang Nias berhasil memproduksi dan mendapat keuntungan besar dari pembuatan minyak kasar dari buah kelapa menjadi minyak goreng. Sementara itu dalam konteks garam, adanya produksi garam yang besar di Pulau Nias ditandai oleh tulisan Muhammad Saleh yang menyatakan ia memerlukan sampai 60 orang kuli dan 16 pedati untuk mengangkut garam yang ia datangkan dari Nias (Kato, 1986; Zed, 2017). Jumlah itu tentu saja sangat besar, dan sekaligus menunjukkan tidak tereksklusinya Nias dari jejaring produksi dan perdagangan yang lebih luas pada masa itu, dan Nias adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia maritim pantai barat Sumatera.

Dari buku kenang-kenangan itu diketahui bahwa para pedagang dari Pariaman juga telah melakukan hubungan

dagang dengan penduduk penghasil damar di Pulau Telo yang berada di antara Pulau Siberut dan Pulau Nias. Muhammad Saleh sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa 17 perahu yang dimilikinya melakukan pelayaran secara rutin antara Pariaman, Padang, Sibolga, dan Pagai di Kepulauan Mentawai (Kato, 1986; Zed, 2017). Hal ini tentu saja menunjukkan sudah adanya mobilitas antarwilayah yang dilakukan penduduk berbagai pulau di pesisir barat Sumatera, maupun penduduk dari daratan Sumatera ke pulau-pulau itu. Keberadaan budak yang berasal dari penduduk di pulau-pulau pesisir barat Sumatera di berbagai tempat di Samudera Hindia, khususnya di sepanjang pantai barat Sumatera, laut Jawa, Selat Malaka, dan laut Cina Selatan, merupakan salah satu indikator terjadi mobilitas orang dari pulau-pulau itu ke berbagai wilayah lain.

Perpindahan atas ruang dalam konteks perbudakan memang tidak dilakukan atas kemauan sendiri, akan tetapi hal itu tetap tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai bagian dari proses diaspora penduduk ruang laut pesisir barat Sumatera ke berbagai tempat, khususnya di Asia Tenggara. Menurut kajian yang dilakukan Markus Vink tentang perbudakan yang dilakukan Belanda dan perdagangan budak di Samudera Hindia pada abad ke-17, pusat-pusat asal budak di Kepulauan Indonesia berada di Sulawesi, Bali, Kalimantan, Buton dan kepulauan Nusa Tenggara. Di dalam tulisannya itu, Vink memang tidak secara spesifik menyebutkan pulau-pulau di pesisir barat Sumatera sebagai apa yang disebutnya sebagai salah satu dari tiga sirkuit atau subdaerah asal para budak. Walaupun begitu, dia mengidentifikasi ujung tenggara Sumatera sebagai bagian dari sirkuit atau subdaerah asal budak di Asia Tenggara (Vink, 2003).

Terlepas dari pendapat Vink di atas, kajian yang dilakukan Anatona secara jelas menunjukkan bahwa pulau-pulau di sebelah barat Sumatera itu memberi sumbangan yang penting dalam perbudakan dan perdagangan budak di wilayah barat Indonesia, paling tidak sampai dua dekade terakhir abad ke 19. Bahkan sampai

tahun 1860-an, Anatona dapat membuktikan bahwa jejaring perdagangan budak dari Pulau Nias ke dua wilayah yang dikuasai Inggris yaitu Penang dan Singapura masih terus berlangsung (Anatona, 2006). Kedudukan Nias sebagai salah satu pusat asal budak didukung oleh catatan sebelumnya seperti yang dipaparkan Marsden dalam bukunya. Menurut Marsden, tidak kurang dari 450 orang budak dikirim dari Nias ke pelabuhan di Natal setiap tahun, dan pada waktu yang sama 150 orang budak dikirim ke pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di sebelah utara (Marsden, 2008). Sementara itu berdasarkan buku kenang-kenangan Muhammad Saleh diketahui, bahwa seorang pedagang Belanda yang disebut Pelember (van den Berg?) yang tinggal di Pariaman memiliki banyak pembantu, dan diantara mereka sebagian besar adalah orang dari pulau-pulau di pantai barat Sumatera, khususnya Nias (Kato, 1986; Zed, 2017).

Adanya interaksi antara masyarakat di pulau-pulau di sisi barat Sumatera dengan masyarakat lain yang sudah berlangsung sejak lama, dapat dilihat lebih jauh dalam perkembangan agama Islam. Perkembangan agama Islam yang pesat di wilayah darat sepanjang pantai barat Sumatera ternyata juga berlanjut ke ruang lautnya. Sejarah Pulau Simeulue menunjukkan hal itu. Dalam konteks interaksi antara ruang laut dengan ruang darat pantai barat dapat dilihat dari proses islamisasi penduduk Pulau Simeulue, yang menurut cerita tutur melibatkan seorang ulama dari Minangkabau yang khusus didatangkan oleh Sultan Aceh ke pulau itu pada abad ke-16. Dalam perkembangan lebih lanjut, penduduk pulau ini menjadi semakin heterogen, ketika baik penduduk dari daratan Sumatera seperti orang Minangkabau, Melayu, dan Batak maupun penduduk dari pulau-pulau di sekitarnya, termasuk orang Nias dan Mentawai yang telah beragama Islam, semakin banyak yang bermigrasi ke pulau ini. Bahkan pada masa berikutnya, para nelayan dari Sulawesi Selatan dan Madura juga banyak yang datang dan kemudian menetap bertempat tinggal di pulau ini.

Sementara itu William Marsden mencatat, bahwa penduduk Pulau Banyak merupakan orang Maruwi yang telah beragama Islam. Mereka memiliki hubungan ekonomi dengan penduduk di ruang darat pantai barat, melalui perdagangan kerang dan sarang burung walet (Marsden, 2008). Dalam konteks yang lain, seorang misionaris muda dari gereja Baptis dari Amerika bernama Henry Lyman datang mengunjungi sisi tenggara Pulau Nias pada pertengahan 1834 juga mencatat tentang keberadaan orang Islam yang hidup berdampingan dengan penduduk setempat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang Austronesia. Ia pada waktu itu sebenarnya berencana memperkenalkan ajaran Kristiani kepada penduduk asli Nias di pedalaman, namun usaha itu tidak diteruskan karena dianggap terlalu berbahaya. Lyman mencatat, bahwa di pulau Nias telah terdapat sekelompok orang "Melayu" beragama Islam yang datang dari daratan Sumatera. Mereka menanam berbagai jenis buah-buahan dan kopi, yang kemudian juga diadopsi oleh penduduk asli setempat (Reid, 1995). Hal ini diperkuat dengan foto dari hasil penelitian E.E.W.Gs. Schroder pada dekade pertama abad ke-20, yang menunjukkan adanya komunitas Muslim di Nias bagian utara (Schroder, 1917)

Sementara itu dalam konteks sejarah kebudayaan, keterampilan orang Nias sebagai tukang kayu, mebel, dan berbagai kerajinan lain telah menghasilkan arsitektur yang sangat luar biasa (Feldman, 1984). Selama ini secara historiografis orang Nias selalu diposisikan sebagai masyarakat prasejarah dengan tingkat kemampuan teknologi dan artistik di bawah rata-rata masyarakat yang modern dan beradab. Namun, foto rumah orang Nias yang diambil pada tahun 1916 yang terdapat dalam buku William Marsden edisi bahasa Indonesia (Marsden, 2008) menunjukkan bahwa, kemampuan arsitektural dan artistik yang mereka warisi dari tradisi Austronesia merupakan sebuah mahakarya kebudayaan yang luar biasa. Seperti kelompok masyarakat Austronesia yang

masih terdapat di Taiwan dan Vietnam misalnya, rumah-rumah orang Nias dibangun sebagai wujud dari kecerdasan kultural yang berpadu dengan kenyataan lingkungannya. Hal itu dapat dilihat pada keberadaan rumah milik pemimpin setempat di Bawamatalowo Nias dengan tinggi 20 dan memiliki lebih dari 100 pilar pada akhir 1970-an, yang sekali lagi membuktikan adanya tradisi arsitektural yang luar biasa pada masyarakat di ruang laut ini (Schroder, 1917; Feldman, 1984; Viaro *et al.*, 2006).

Dalam konteks terakhir yang berkaitan dengan warisan Austronesia itulah pengabaian atas hak sejarah masyarakat yang mendiami ruang laut sisi barat Pulau Sumatera ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Menurut sebuah kerangka berpikir, bahasa Indonesia saat ini mengandung seperempat pengaruh rumpun bahasa India, seperempat pengaruh rumpun bahasa Arab-Islam, seperempat pengaruh rumpun bahasa Eropa, dan seperempat terakhir pengaruh rumpun bahasa Austronesia. Akan tetapi dalam kenyataannya, tradisi intelektual yang diwarisi dari prinsip-prinsip berpikir para orientalis telah mengabaikan pengaruh seperempat yang terakhir dalam setiap penjelasan. Akibatnya, elemen Austronesia hilang begitu saja dari ruang intelektual dalam setiap penjelasan atas kenyataan historis yang ada dalam sejarah Indonesia.

Dekonstruksi historiografis yang membangun formulasi perspektif baru yang mengacu pada arti penting warisan Austronesia dalam sejarah Indonesia akan bermanfaat untuk menjelaskan berbagai kenyataan yang ada pada saat itu, misalnya kenyataan sistem pewarisan pada masyarakat Minangkabau. Keberadaan sistem pewarisan dalam masyarakat Minangkabau sampai saat ini yang mengacu pada prinsip matrilineal, tentu saja tidak dapat dijelaskan sebagai bagian dari tradisi Islam yang telah menjadi identitas simbolik masyarakat yang berpusat di Sumatera Barat ini. Salah satu alternatif adalah menghubungkannya dengan tradisi Hindu-India, yang secara historis memang pernah mengakar cukup lama dalam

kekuasaan di wilayah ini. Akan tetapi satu penjelasan lain yang selalu dilupakan, bahwa bukan tidak mungkin sistem pewarisan yang mengikuti garis perempuan itu merupakan keberlanjutan dari peradaban besar Austronesia, seperti yang masih berlaku di dalam masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Secara antropologis, masyarakat di Kepulauan Mentawai dikategorikan ber-sistem patrilineal. Namun dalam kenyataannya menurut Peter Belwood, perempuan dan kerabatnya merupakan pemegang hak atas tanah, misalnya karena mas kawin belum dibayar. Lebih lanjut disebutkan, di kepulauan ini tanah yang ditanami padi dan talas juga dimiliki dan mewarisi oleh perempuan (Belwood, 2000). Hal itu berarti, bukan tidak mungkin sistem matrilineal yang bertahan selama ini dalam masyarakat Minangkabau yang secara geografis dan historis memiliki kedekatan dengan masyarakat Mentawai. Asumsi ini bahkan memunculkan pertanyaan berikutnya, apakah hal itu merupakan keberlanjutan dari warisan tradisi Hindu-India dan Austronesia yang berpadu dalam proses historisnya? Padahal berdasarkan bukti-bukti yang ada diketahui bahwa, secara historis masyarakat yang hidup di ruang laut sisi barat pulau Sumatera itu hampir-hampir tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-India (Schroder, 1917; Hadiwinoto *et al.*, 2008; Harmmerle, 2001). Hal serupa dapat juga dihubungkan lebih lanjut dengan kedudukan dan peran perempuan yang sangat menentukan dalam sistem ekonomi dan produksi lada di Bengkulu pada masa kekuasaan Inggris di wilayah ini, paling tidak sejak abad ke-18 (Andaya, 1995). Secara historiografis, semua itu seharusnya menunjukkan betapa dinamisnya wilayah sisi barat Pulau Sumatera beserta ruang lautnya dalam proses sejarah.

SIMPULAN

Ruang laut di sisi barat Pulau Sumatera yang secara historis telah lama menjadi bagian dari hubungan antardaerah di Indonesia ternyata hampir-hampir tidak mendapat tempat dalam ruang sejarah

Indonesia selama ini. Bahkan sampai dengan abad ke-21 ini, masyarakat yang ada di ruang laut itu masih dianggap hanya punya masa lalu yang dikategorikan sebagai prasejarah dan tidak pernah berubah. Padahal berbeda dengan citra yang diyakini orang luar selama ini, masyarakat yang ada di dalamnya ternyata sudah lama tidak lagi tunggal (Harmmerle, 2001). Pengerdilan dan pengabaian atas kenyataan historis diri sendiri menjadi ciri penting dalam historiografi Indonesiasentris selama ini, sehingga yang hadir secara dominan tetap saja unsur-unsur yang dianggap luar. Dalam konteks sejarah hubungan antardaerah di ruang darat dan laut dari sisi barat Pulau Sumatera, bukan hanya ruang maritim yang tereksklusi melainkan juga kebudayaan yang ada dianggap tidak cukup berharga bagi Indonesia yang secara historis bertransformasi dalam label dari modern kolonial menjadi modern Indonesia. Perspektif historiografis seperti itu hanya menghasilkan keterasingan baru dalam sejarah hubungan antardaerah, dan sekaligus ingin mengatakan bahwa ruang laut sebenarnya tidak cukup mampu membangun kemodernan dan keberadaban Indonesia. Dalam format lama historiografi Indonesia, diskursus yang berkembang adalah ruang laut sebagai mitos atau legenda, sedangkan kenyataan hanya hadir dalam ruang darat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar karya sejarah maritim di Indonesia secara historiografis cenderung ditulis tanpa laut, dan laut bukan merupakan ruang dimana manusia menyejarah. Salah satu contoh, nelayan sebagai sebuah kategori sosial yang diciptakan oleh ruang laut, hampir-hampir tidak mendapat tempat dalam narasi besar sejarah Indonesia.

Padahal ketika orientasi masyarakat paling mutakhir yang menunjukkan arti penting konsep kembali ke alam dan kelestariannya misalnya, maka kenyataan yang berlaku pada masyarakat yang mendiami ruang laut di sisi barat Pulau Sumatera tidak dapat lagi disebut sebagai bagian dari prasejarah atau tidak beradab. Proses yang mereka lalui selama ini meru-

pakannya bagian dari sejarah peradaban manusia yang berhasil mempertahankan kelestarian alam, ketika manusia dan alam hidup sebagai satu kesatuan yang harmonis dan tidak saling merugikan. Mereka bukan orang yang tidak ingin dan tidak dapat berubah, melainkan perubahan yang mereka pahami adalah sesuatu yang berlangsung mengikuti dinamisasi yang dimiliki alam, sehingga tidak terjadi kerusakan baik pada manusia maupun pada alam yang akan mengancam keberlanjutan kedua-duanya. Oleh karena itu, prinsip hidup yang visioner dan berkelanjutan untuk masa depan yang terus dielaborasi selama ini, sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar itu. Walaupun disebut sebagai kekurangan, mereka hanya tidak memiliki pendidikan formal dan teknologi yang cukup untuk merusak sebagai perwujudan dari kerakusan nafsu manusiawi.

Akhirnya, bukan suatu yang berlebihan untuk mengatakan bahwa ke-modernan yang secara historiografis sering dihubungkan dengan keadaban selama ini, sebenarnya merupakan wujud lain dari ketidakberadaban itu sendiri ketika terjadi duplikasi yang dibentuk oleh kondisi hiper-realitas. Berbagai unsur yang dianggap sebagai representasi dari modern dan beradab itu ternyata bersimulasi menjadi elemen penghancur yang mengancam keberlanjutan eksistensi baik manusia maupun alam. Oleh karena itu sudah saatnya para sejarawan Indonesia berani mengembangkan sebuah historiografi Indonesiasentris yang memberi hak sejarah kepada masyarakat yang mendiami ruang laut di sisi barat Pulau Sumatera. Bukan seperti selama ini, yang menempatkan masyarakat di pulau-pulau itu hanya di dalam ruang prasejarah dari sejarah Indonesia. Dalam konteks sejarah hubungan antardaerah, rekonstruksi masa lalu dengan perspektif alternatif itu akan menginklusi tidak hanya orang-orang kebanyakan melainkan juga dunia maritim mereka sebagai ruang baru yang selama ini diabaikan dalam konstruksi sejarah Indonesia dan narasi nasional. Hal itu be-

rarti, sebuah format baru historiografi Indonesiasentris dapat diwujudkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Naskah asli tulisan ini disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya Padang dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada November 2013 dan Konferensi Nasional Sejarah X yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 7-10 November 2016. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan membantu dalam proses perbaikan tulisan ini. Terutama kepada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM dan KITLV-Leiden, yang telah memberi kesempatan kepada penulis menjadi peneliti tamu di KITLV sejak Juni 2017, sehingga memungkinkan penulis mengakses koleksi perpustakaan Universitas Leiden dalam proses perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan A.B. Lopian (Ed.). 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 1-9*. Jakarta: W. Van Hoeve-Ichtiar Baru.
- Alfian, T. Ibrahim. 2005. *Kontribusi Samudra Pasai Terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Cenninets.
- Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Anatona. 2006. "Perbudakan dan Perdagangan Budak di Kawasan Selat Malaka, 1786-1880an", *Desertasi*. Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah.
- Andaya, Barbara Watson. 1995. "Women and Economic Change, The Paper Trade in Pre-Modern Southeast Asia." *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 38(2): 165-190.
- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Barnes, Harry Elmer. 1963. *A History of Historical Writing*. 2 edition. New York: Dover Publication.
- Bastin, John. 1965. *The British in West Sumatra*. Cambridge: Cambridge University Press on behalf School of Oriental and

- African Studies University of London.
- Baudrillard, Jean. 1983. *Simulations*. New York: Semiotext.
- Belwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia.
- Coutin, Susan B. 2000. "Denationalization, Inclusion, and Exclusion, Negotiating the Boundaries of Belonging." *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7(2): 585-593.
- Danandjaja, James. 1975. "The Use of Prose Narrative for the Reconstruction Tano Nihai Local History." *Berita Antropologi*, 7(19): 12-22.
- Danandjaja, James. 1969-1970. *Acculturation in Tano Nihai (The Island of Nias)*. dalam <http://digitalassets.lib.berkeley.edu/anthpubs/ucb/text/kas044-002.pdf>.
- Delfi, Maskota. 2013. "Kaipa Pulaggajatnu? Wacana Kementawaian di Bumi Sikerei." *Disertasi*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Drakkard, Jane. 2003. *Sejarah Raja-Raja Barus. Dua Naskah dari Barus*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Feldman, Jerome, 1984, "Dutch Galleons and South Nias Palaces", *RES, Anthropology and Aesthetics*, 7/8: 21-32.
- Foucault, M. 2006. *History of Madness*. Abingdon: Routledge.
- Ginsel, W.A. 2003. *Catatan Tentang Gerakan "Fa'awosa" di Nias*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias.
- Guillot, Claude (Ed.). 2002. *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Guillot, Claude et al. 2008. *Barus Seribu Tahun yang Lalu*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- Hadiwinoto, Suhadi et al. 2008. *Nias dari Masa Lalu ke Masa Depan*. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.
- Harfield, Alan. 1995. *Bencoolen. A History of the Honourable East India Company's Garrison on the West Coast of Sumatra 1685-1825*. Cambridge: University Press on behalf of Department of History National University of Singapore.
- Hammerle, P. Johannes Maria. 2001. *Asal Usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias.
- Haynes, Michael. 1998. "European Union and Its Periphery, Inclusion and Exclusion." *Economic and Political Weekly*, 33 (35): 87-97.
- Jaspan, M.A. 1964. "A Note on Enggano." *Man*, 64: 109-113.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (ed). 1976. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1-6*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kathirithamby-Wells, J. 1969. "Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663." *Journal of Southeast Asian History*, 10(3): 453-479.
- Kathirithamby-Wells, J. 1977, *The British West Sumatran Presidency, 1760-1785. Problem of Early Colonial Interprise*. Kuala Lumpur: Universiti Malaysia
- Kato, Tsuyoshi. 1986. "Rantau Pariaman, Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX." Dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang. Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX-XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 77-115.
- Kehding, F. 1886. "Sumatra in 1886", *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, 18: 345-349.
- Kompas*, 3 November 2016.
- Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Persoon, Gerard A. 2003. "Conflict over Trees and Waves on Siberut Island." *Geografiska Annaler Series B. Human Geography*, 85(4): 253-264.
- Peters, Michael A. & Besley, Tina A.C. 2014. "Social Exclusion/Inclusion, Foucault's a nalytics of exclusion, the political ecology of social inclusion and the legitimization of inclusive education." *Open Review of Educational Research*, 1(1): 99-115.
- Pikiran Rakyat*, 24 April 2017.
- Polonen, Kari. 2005. "The Politics of Conceptual History." *Contributions to the History of Concept*, 1(1): 37-50.
- Pradjoko, Didik. 2006. "Perebutan Pulau dan Laut, Portugis, Belanda dan Kekuatan Pribumi di Laut Sawu Abad XVII-XIX", *Makalah*, Jakarta, Konferensi Nasional Sejarah VIII
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesisentris?!*. Yogyakarta: Ombak
- Rappard, Th. C. 1909. "Het eiland Nias en zijne bewoners." *BKI*, 62: 477-648.
- Reid, Anthony (Ed.). 1995. *Witnesses to Sumatra. A Travellers' Anthology*. Oxford: Oxford University Press.

- Scarduelli, Pietro. 1990. "Accummulation of Head, Distribution of Food, The Image of Power in Nias", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 146(4): 448-462.
- Schlegel, G. 1901. "The Old States in the Island of Sumatra." *T'oung Pao*, 2(2): 107-136.
- Schlegel, G. 1901. "The Old States in the Island of Sumatra." *T'oung Pao*, 2(3): 167-182.
- Schlegel, G. 1901. "The Old States in the Island of Sumatra." *T'oung Pao*, 2(5): 329-377+417.
- Schroder, E.E.W.Gs. 1917, *Nias ethnographische, geographische en historische aantekeningen en studien. I tekst, II laten en kaarten*. Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill.
- Tanjung, Ida Liana. 2016. "Antara Orang Pasisir dan Orang Batak di Tapanuli, Kesadaran Identitas Etnik di Barus dan Sibolga, 1842-1980-an." *Disertasi*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Tempo.co*, 18 November 2016.
- Wolters, O.W. 1967. *Early Indonesian Commerce, A Study of the Origins of Srivijaya*. Ithaca: Cornell University Press
- Wolters, O.W. 1970. *The Fall of Sriwijaya in Malay History*. Ithaca: Cornell University Press
- Viaro, Alain *et al.* 2006. *Traditional Architecture of Nias*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias
- Vink, Markus. 2003. "The World's Oldest Trade, Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century", *Journal of World History*, 14 (2): 131-177.
- Zed, Mestika. 2017. *Saudagar Pariaman Menerjang Ombak Membangun Maskapai*. Jakarta: LP3ES.
- Zuhdi, Susanto (Ed.). 1993. *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.